

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Amane, Ade Putra Ode dkk. *Pengantar Ilmu Pemerintahan Konsep dan Teori*, Yogyakarta: Green Pustaka Indonesia, 2024.
- Arens, A. A., & Loebbecke, J. K. *Auditing: An Integrated Approach*. Prentice Hall, 1994.
- Armanu, Solimun dan Adji Achmad Rinaldo Fernande. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Perspektif sistem Mengungkap Novelty dan memenuhi validitas penelitian*. Malang: UB Press, 2018.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MKRI, 2006.
- Bastian, Indra. *Audit Sektor Publik: Pemeriksaan Pertanggungjawaban Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat, 2014.
- Bovens, Mark the Quest for Responsibility: Accountability and Citizenship in Complex Organisations. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.
- Dubnick M. J. dan B.S. Romzek, *American Public Administration: Politics and the management of expectations* New York: Macmillan Publishing Company).
- Dwiyanto, Agus. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- Freeman, R. E. *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Boston: Pitman. 1984.
- Hadiputri, Grace Kelly dkk. *Hukum Administrasi Negara*. Padang: Gita Lentera, 2024.
- Hakim, Dayan dan Yoyo Sudaryo. *Corporate Restructuring*, Yogyakarta: Andi, 2024.
- Harnoviansah, Ana Sopanah dan Rida Perwita Sari. *Bunga Rampai Akuntansi Publik: Isu Kontemporer Akuntansi Publik*, Surabaya: Unitomo Press, 2020.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2020.
- Hughes, Owen E. *Public Management and Administration: An Introduction*. Macmillan: Palgrave, 2012.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Imaniyati, Neni Sri dkk. *Pengelolaan Dana Haji Indonesia Kajian Dari Perspektif Ekonomi Syariah*, Jakarta: Damera Press, 2022.
- Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Istitha`ah dalam Melaksanakan Ibadah Haji*, Jakarta: MUI, 1979.
- Komite Nasional Kebijakan Governansi. *Pedoman Umum Governansi Sektor Publik Indonesia (PUG-SPI)*. Jakarta 2022.
- Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: Andi, 2018.
- Mufraini, M Arief. *Dana Haji Indonesia, Harapan dalam Paralogisme Pengelolaan dan Teorisasi Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenada, 2024.
- Nadjib, Abdul dan Khairunnas. *Teori Administrasi Publik*. Medan: PT media Penerbit Indonesia, 2024.



- Nur, Sri Wahyuni. *Akuntansi Dasar Teori & Teknik Penyusunan Laporan Keuangan*, Makasar: Cendekia Publisher, 2020.
- Purwati, Ani. *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1985.
- Wibowo, Mardian. *Relasi Kekuasaan Negara dan Hukum*, Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2024.
- Widodok, Sri. *Kepemimpinan Konsep, Teori, dan Fenomena*, Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2022.
- Yando, Agus Defri dan Mortigor Afrizal Purba. *Kecenderungan Kecurangan Akuntansi*, Batam: Batam Publisher, 2020.
- Yasir, Nurjanah, Samsir. *Manajemen Komunikasi Lingkungan Berbasis Pengembangan Parawisata*, Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2023.
- Zainuddin, Ali. *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

## B. Artikel Jurnal

- Agustinus, Salle. "Makna Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah", *KEUDA Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah*, ISSN: 2477-7838, (2017) <https://core.ac.uk/download/pdf/229203944.pdf>
- Bovens, M. "Analyzing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework." *European Law Journal*, 13(4), (2007): 447-468.
- Burhanudin. "Sistem Pengelolaan BPIH Menurut Perspektif Hukum Positif di Indonesia." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, (2014).
- DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. "The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields." *American Sociological Review*, 48(2), (1983): 147-160.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. "Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure". *Journal of Financial Economics* 3(4), (1976): 305-360.
- Masita, Devi Angelia dan Nurul Lathifah. "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Periode 2019-2023 dengan Petode Value For Money." *Jurnal Ekonomi Bisnis Manajemen Akuntansi (JEBISMA)* 2 No. 2 (Desember 2024).
- Nurhadi. "Tumpang Tindih Kewenangan dalam Pengelolaan Haji di Indonesia: Studi Regulasi dan Implementasi," *Jurnal Hukum Tata Negara* 10, No. 1.
- Rahmatullah. "Konflik Kelembagaan dalam Tata Kelola Haji: Analisis Regulasi dan Praktik," *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, No. 4, (2023)
- Rohana. *Good Governance dan Pengaruhnya terhadap Kinerja Organisasi Sektor Publik*. Jurnal Akuntansi Publik, 2017.
- Vidyan, Yogashwara dan Rafidah. "Gagasan Penyajian Laporan Keuangan Pengelolaan Dana Haji agasan Penyajian Laporan Keuangan Pengelolaan Dana Haji, Finansia: *Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah* 6, No. 1 (2022). <https://doi.org/10.32332/finansia.v6i1.6305>.
- Zucker, L. G. "The Role of Institutionalization in Cultural Persistence." *American Sociological Review*, 42(5), (1977): 726-743.



### C. Tesis dan Disertasi

- Eka Rachmawati. “Implikasi Lahirnya Badan Pengelolaan Keuangan Haji Terkait Pengelolaan Keuangan Haji”, *Tesis* Program Pascasarjana Univesitas Gadjah Mada, 2018
- Rina Farihatul Jannah. “Kebijakan Penyelenggaraan Perjalanan Haji Indonesia Tahun 1945-2000 M”, *Tesis* Program Pascasarjana Univesitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018.

### D. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3832).
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845).
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846).
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5605).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338).
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165)
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6182).
- Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2017 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 253).



- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)
- Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348)
- Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2024 tentang Badan Penyelenggara Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350).
- Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1219).
- Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 874).

#### **E. Dokumen-Dokumen Resmi**

- Auditorat Utama Keuangan Negara V, *Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Badan Pengelola Keuangan Haji Tahun 2019 Nomor 32.C/LHP/XVIII/05/2020*, Jakarta: BPK, 2020.
- Auditorat Utama Keuangan Negara V. *Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Atas Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1444H/2023M Pada Kementerian Agama Dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta dan Arab Saudi*. Jakarta: BPK, 2023.
- Direktorat Penelitian dan Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi, *Laporan Hasil Kajian Sistem Penyelenggaraan Ibadah Haji*, Jakarta: KPK, 2019.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Keuangan Haji”, (2012).
- United Nations Development Programme (UNDP). “Governance for Sustainable Human Development”. *UNDP Publications*, (1997).
- Suryadharma Ali. “Penjelasan Menteri Agama Republik Indonesia pada Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR RI mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Keuangan Haji.” 3 Maret 2014.
- Suryadharma Ali. “Penjelasan Menteri Agama kepada DPR mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Keuangan Haji.” 8 Juli 2014.

#### **F. Koran/Majalah**

- Ade Irawan, “Korupsi dalam Penyelenggaraan Haji”, Koran Tempo, <https://www.bpk.go.id/assets/files/attachments/2010/10/22-Koran-Tempo1.pdf>, (diakses pada 9 Februari 2025).
- Binti Mufarida, “Prabowo Resmi Bentuk Badan Penyelenggara Haji, Dipimpin Gus Irfan dan Dahnil Anzar”, SINDOnews.com. <https://nasional.sindonews.com/read/1476661/12/prabowo-resmi-bentuk-badan-penyelenggara-haji-dipimpin-gus-irfan-dan-dahnil-anzar-1729566621> (diakses 13 Juni 2025).
- Putri Safira Pitaloka, “Ibadah Haji 2025 Masa Transisi Peralihan dari Kemenag ke BP Haji”. Tempo. <https://www.tempo.co/politik/ibadah-haji-2025-masa-transisi-peralihan-dari-kemenag-ke-bp-haji-1192252> (diakses 2 Maret 2025).



## G. Internet

- A.A. Oka Mahendra, “Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan.” ditjenpp.kemenkumham.go.id.<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/421-harmonisasi-peraturan-perundang-undangan.html> (diakses 16 Maret 2025).
- Ade Irawan. “Dugaan Setoran Dana Abadi Umat untuk Meteri Agama”, antikorupsi.org, Indonesia Corruption Watch, <https://www.antikorupsi.org/id/article/dugaan-setoran-dana-abadi-umat-untuk-menteri-agama> (diakses 3 Juni 2025).
- Amr. ”Revisi UU Haji, Titian Menuju Penghapusan Monopoli Depag”, Hukumonline.com, 30 Januari 2004, <https://www.hukumonline.com/berita/a/revisi-uu-haji-titian-menuju-penghapusan-monopoli-depag-ho19594/?page=all> (diakses 2 Juni 2025).
- Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. “Anngito Abimanyu: Dana Haji Bukan Uang Negara”, <https://alpha.dpd.go.id/artikel-detail/anggitto-abimanyu-dana-haji-bukan-uang-negara>, (diakses 4 Juni 2025).
- Febriana Firdaus. ”Temuan PPAK, Bagaimana Dana Haji Itu Ditilap?”, Tempo.co, 11 Februari 2014, <https://www.tempo.co/hukum/temuan-ppak-bagaimana-dana-haji-itu-ditilap--1548262> (diakses 2 Juni 2025).
- Indonesia Corruption Watch. “Laporan Tahunan Indonesia Corruption Watch 2009”, <https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Laporan%2520Akhir%2520Tahun%2520ICW%25202009.pdf>, (diakses 9 Februari 2025).
- KBBI VI Daring. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/Beranda/BatasSehari> (diakses 20 Desember 2024).
- Nur Jamal Shaid. “BPKH Catat Dana Kelolaan Haji Capai Rp 161,94 Triliun hingga Februari 2024”. <https://money.kompas.com/read/2024/04/01/233918426/bpkh-catat-dana-kelolaan-haji-capai-rp-16194-triliun-hingga-februari-2024> (diakses 21 Juli 2024).
- Rhetorika Mavazah El Ummah, dkk. “Pertanggungjawaban Pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Ditinjau dari Undang-Undang No.13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Studi Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto)”. <https://hukum.studentjournal.ub.ac.id> (diakses 24 Juli 2024).
- Rofiq Hidayat. ”Badan Pengelola Keuangan Haji Belum Dibentuk, Pemerintah Abaikan UU”, Hukumonline.com, 18 Oktober 2016, <https://www.hukumonline.com/berita/a/badan-pengelolaan-keuangan-haji-belum-dibentuk--pemerintah-abaikan-uu-lt5805d6fcde598/> (diakses 4 Juni 2025).
- Tri Meilani Ameliya. “Anggota DPR ingatkan perlunya pendetailan tugas BP Haji dan Kemenag”, Antara, <https://www.antaraneews.com/berita/4662261/anggota-dpr-ingatkan-perlunya-pendetailan-tugas-bp-haji-dan-kemenag>. (diakses 2 Maret 2025).



- Yudha Setiawan. “Korupsi Dana Haji Rp 700 Miliar; Taufik Kamil ditahan.”, antikorupsi.org, Indonesia Corruption Watch, 18 Juni 2005, <https://antikorupsi.org/id/article/korupsi-dana-haji-rp-700-miliar-taufik-kamil-ditahan> (diakses 3 Juni 2025).
- Yuntho, Emerson, “Korupsi Penyelenggaraan Haji”, antikorupsi.org, Indonesia Corruption Watch, 6 Juni 2014, <https://antikorupsi.org/id/article/korupsi-penyelenggaraan-haji> (diakses 3 Juni 2025).